BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perundungan di lingkungan sekolah merupakan tantangan serius yang dapat mengganggu kesejahteraan emosional, perkembangan individu, dan prestasi akademik peserta didik. Peserta didik jenjang menengah pertama khususnya, lebih rentan terhadap tekanan sosial dan kurang memiliki keterampilan untuk menangani konflik, yang dapat memicu masalah jangka panjang seperti stress, kecemasan, depresi, dan penurunan kepercayaan diri.[2] Kekerasan dan perundungan (*bullying*) merupakan bentuk konflik sosial yang tidak terkendali dan mencerminkan hilangnya penghayatan terhadap nilai-nilai sosial seperti saling menghargai, menghormati, dan peduli. Ketika masyarakat termasuk di lingkungan sekolah mengabaikan nilai-nilai tersebut, maka kekerasan bisa muncul dan berdampak negatif pada fisik maupun psikologis korban, serta merusak iklim belajar secara keseluruhan.[3] Semakin maraknya pemberitaan mengenai kekerasan dan perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh peserta didik di lingkungan pendidikan menjadi cerminan nyata bahwa terjadi penurunan moralitas. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan lemahnya pengendalian diri dan empati peserta didik, tetapi juga menjadi tanda bahwa

[2] Dita Ramadhanti dan Ainur Rosyid, "Strategi Sekolah Mencegah Pembullyan," *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 5 (28 September 2024), hlm 1157. doi:10.59141/comserva.v4i5.2220.

[3] Wirastiani Binti Yusup dkk., "Edukasi Anti Kekerasan sebagai Upaya Mewujudkan Sekolah yang Aman dan Nyaman," *ABDIRA: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2025), hlm 38.

nilai-nilai karakter seperti saling menghargai, toleransi, dan tanggung jawab mulai tergerus. Penurunan moral ini dapat berdampak serius terhadap iklim belajar, hubungan antar peserta didik, dan masa depan kehidupan sosial masyarakat secara lebih luas.[4]

Berdasarkan data yang dirilis oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), pada tahun 2024 tercatat sebanyak 573 kasus kekerasan terjadi di lingkungan pendidikan. Angka tersebut naik drastis jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencatat 285 kasus. Sebelumnya, pada tahun 2022 ditemukan 194 kasus, tahun 2021 sebanyak 142 kasus, dan pada 2020 terdapat 91 kasus. Kekerasan seksual menjadi yang paling dominan pada tahun 2024 dengan presentase (42%), diikuti perundungan (31%), kekerasan psikis (11%), kekerasan fisik (10%), dan diskriminasi (6%). Kekerasan ini tidak terbatas pada satu wilayah saja, melainkan terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Lima daerah dengan jumlah kasus tertinggi adalah Jawa Timur (81 kasus), Jawa Tengah (45 kasus), Banten (32 kasus), dan DKI Jakarta (30 kasus). Setiap harinya, setidaknya ada satu kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Kekerasan tersebut tidak hanya ditemukan di sekolah umum, tetapi juga terjadi di madrasah dan pesantren. Data JPPI menunjukkan bahwa (64%) kasus terjadi di sekolah, (16%) di madrasah, dan (20%) di pesantren. Sementara itu, korban kekerasan seksual mayoritas adalah perempuan, dengan presentase mencapai (97%), sedangkan korban perundungan didominasi laki-laki dengan

[4] Diardana Prima Sintasari, Rizka Adelia Amanda, dan Alivia Salsabila Herlinasari, "Pengaruh Perundungan Terhadap Anak di Lingkungan Sekolah," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 3 (29 Juli 2024), hlm 1370. doi:10.60126/maras.v2i3.397.

presentase (82%). Ironisnya, pelaku terbanyak justru berasal dari pendidik atau guru dengan presentase (43,9%), disusul peserta didik (13,6%), tenaga kependidikan (2,5%), dan pihak lain seperti orang tua, petugas keamanan, atau masyarakat (39,8%). Meski banyak pendidik menjadi pelaku, namun (10,2%) dari mereka juga menjadi korban kekerasan di sekolah.[5]

Sepanjang tahun 2024, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat telah menerima sebanyak 2.057 laporan terkait pelanggaran terhadap hak-hak anak. Dari jumlah tersebut, salah satu masalah yang paling menonjol adalah kasus perundungan (bullying) yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Sebanyak 241 kasus yang dilaporkan merupakan kasus anak menjadi korban perundungan di sekolah, dan yang lebih mengkhawatirkan, seluruh kasus ini tidak tercatat dalam laporan resmi kepolisian. Artinya, banyak kasus kekerasan di sekolah yang tidak ditangani secara hukum dan hanya berhenti di lingkup internal sekolah atau bahkan dibiarkan begitu saja. Selain itu, KPAI juga mencatat 240 kasus kekerasan fisik dan psikis lainnya yang menimpa anak-anak. Kekerasan ini mencakup tindakan penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian antar pelajar, kekerasan verbal, hingga anak yang menjadi korban dalam aksi tawuran. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan di lingkungan anak, khususnya dalam konteks pendidikan, masih menjadi persoalan serius yang belum sepenuhnya terselesaikan.[6] Fakta ini

[5] Wakos Reza Gautama dan Muhammad Yasir, "Memutus Mata Rantai Kekerasan di Lingkungan Pendidikan," *Liputan Khas Suara*, 2 Januari 2025, https://liks.suara.com/read/2025/01/02/201633/memutus-mata-rantai-kekerasan-di-lingkungan-pendidikan?utm.

[6] Humas KPAI, "Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia," KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 11 Februari 2025,

mencerminkan bahwa lingkungan pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya aman bagi anak-anak. Sekolah, yang seharusnya menjadi tempat belajar dan berkembang, justru masih menjadi ruang yang rawan kekerasan. Minimnya respons tegas dari pihak sekolah, kurangnya pendampingan psikologis, serta lemahnya penegakan aturan menjadi faktor yang memperburuk situasi. Banyak korban memilih diam karena takut, malu, atau tidak tahu harus melapor ke mana.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat bahwa sepanjang Januari hingga September 2024, terjadi 36 kasus kekerasan di lingkungan sekolah dengan total 144 siswa menjadi korban. Dari data tersebut, jenjang pendidikan yang paling banyak mengalami kekerasan adalah tingkat SMP/MTs, yaitu sebesar (36%) dari total kasus. Disusul oleh jenjang SMA dengan (28%), SD/MI sebanyak (22%), dan jenjang SMK sebanyak (14%). Jika dilihat dari lembaga yang membawahi satuan pendidikan, sebanyak (66,66%) kasus kekerasan terjadi di sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Sementara itu, (33,33%) kasus lainnya terjadi di lembaga pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag), termasuk pondok pesantren. Meskipun jumlah kasus di bawah Kemenag lebih sedikit secara persentase, dampaknya sangat memprihatinkan. Tercatat empat siswa meninggal dunia akibat kekerasan fisik di lingkungan pesantren, yang berarti rata-rata satu anak

https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia.

meninggal setiap dua bulan. Di sisi lain, satuan pendidikan di bawah Kemendikbudristek juga tidak luput dari kasus tragis, dengan tiga peserta didik dilaporkan meninggal akibat kekerasan fisik di sekolah. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan di lingkungan pendidikan, baik di bawah Kemendikbudristek maupun Kemenag, merupakan masalah serius yang perlu ditangani secara cepat dan menyeluruh. Perlindungan terhadap peserta didik harus menjadi prioritas utama demi menjamin keamanan, kenyamanan, serta kelangsungan proses belajar yang sehat bagi seluruh anak Indonesia.[7]

Karakter toleransi dipahami sebagai kemampuan untuk menerima perbedaan, menghargai keberagaman, dan menyelesaikan konflik melalui cara-cara yang damai. Nilai ini menuntut proses internalisasi yang berlangsung melalui keteladanan, pembiasaan, serta dukungan lingkungan sosial yang kondusif.[8] Meskipun demikian, temuan observasi awal menunjukkan bahwa penerapan nilai toleransi di kedua lokasi penelitian belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku peserta didik. Dalam interaksi sehari-hari, sebagian peserta didik masih memperlihatkan kecenderungan bersikap eksklusif, melakukan pelabelan negatif, serta memperlakukan teman yang memiliki latar belakang berbeda secara kurang setara. Fenomena ini terjadi tidak secara merata, melainkan hanya ditunjukkan oleh sejumlah kecil peserta didik. Kondisi tersebut

[7] Ilham Pratama Putra, "Sepanjang 2024, Kasus Kekerasan di Sekolah Paling Banyak Terjadi di Jenjang SMP," medcom.id, 30 September 2024, https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/Rb1D7qAN-sepanjang-2024-kasus-kekerasan-di-sekolah-paling-banyak-terjadi-di-jenjang-smp?utm_.

[8] Rika Aswidar dan Siti Zahara Saragih, "Karakter Religius, Toleransi, dan Disiplin pada Siswa Sekolah Menengah Pertama," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran* 6, no. 1 (20 Maret 2022), hlm 139.

mengindikasikan adanya ketimpangan antara konsep toleransi yang ideal dan realitas praktik di lingkungan pendidikan.[9] Berdasarkan observasi awal tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ruang untuk memperkuat implementasi toleransi melalui strategi pendidikan karakter, pembiasaan sosial, serta penegakan tata tertib yang mendukung terciptanya interaksi yang inklusif dan saling menghargai antar peserta didik.

Tata tertib sekolah yang ideal pada dasarnya merupakan aturan yang dirancang untuk bersifat preventif, mendidik, dan berorientasi pada pembentukan perilaku positif, serta dijalankan dengan konsistensi.[10] Namun, hasil observasi awal menunjukkan bahwa pelaksanaan tata tertib di kedua lokasi penelitian belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut. Aturan yang telah disusun secara tertulis belum diimplementasikan secara menyeluruh, dan penegakan kedisiplinan sering kali bersifat reaktif, muncul setelah terjadi pelanggaran. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tata tertib yang ideal dan praktik yang berlangsung di lapangan.[11] Artinya, tata tertib belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan pembinaan, sehingga perlu penguatan dalam aspek implementasi, konsistensi, serta pendekatan edukatif agar mampu mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang tertib, aman, dan bebas perundungan.

---

[9] Hasil observasi pra-penelitian di MTsN 1 Tulungagung dan SMPN 2 Ngunut pada tanggal 14 & 17 November 2025.

[10] Rizqi Widyaningtyas dan Rochman Hadi Mustofa, "Implementasi Kebijakan Anti-Bullying Sekolah Adipangastuti Di SMAN 1 Surakarta," *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 8, no. 01 (28 Desember 2023), hlm 857. doi:10.31316/gcouns.v8i01.5489.

[11] Hasil observasi pra-penelitian di MTsN 1 Tulungagung dan SMPN 2 Ngunut pada tanggal 14 & 17 November 2025.

Kekerasan dan perundungan (*bullying*) di dunia pendidikan masih menjadi persoalan serius yang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Bahkan, tren kekerasan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian mengenai tindakan perundungan (*bullying*) di lingkungan pendidikan penting untuk dilakukan karena perundungan tidak hanya berdampak negatif terhadap kondisi psikologis korban, tetapi juga dapat mengganggu iklim pembelajaran dan menghambat perkembangan sosial peserta didik. Perundungan bukan hanya masalah individu, tetapi masalah sistemik yang berdampak serius terhadap perkembangan psikologis peserta didik. Perundungan juga berdampak langsung pada kesehatan mental dan motivasi belajar peserta didik. Maka, penting untuk meneliti bagaimana sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta bebas dari tindakan kekerasan termasuk perundungan. Meskipun mayoritas sekolah saat ini telah mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam program pembinaan peserta didik serta menerapkan tata tertib sebagai instrumen regulatif, kasus-kasus perundungan masih terus muncul di lingkungan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan program pembangunan karakter dan tata tertib saja belum menjamin terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas perundungan. Karakter toleransi yang semestinya menjadi landasan interaksi antar peserta didik belum sepenuhnya menjadi budaya bersama, sementara tata tertib kerap dipahami hanya sebagai aturan sanksi, bukan sebagai sistem preventif yang mendorong perilaku positif.

Hasil observasi awal di MTsN 1 Tulungagung menunjukkan bahwa pola interaksi sosial antar peserta didik, termasuk relasi senior dengan junior, pada umumnya berlangsung secara inklusif dengan komunikasi antara guru dengan peserta didik yang dialogis dan tidak otoritatif. Dinamika kelompok eksklusif tampak minim, namun dalam praktik keseharian masih ditemukan konflik verbal yang muncul secara terbuka maupun terselubung dibalik norma religius yang kuat. Bentuk perundungan yang teridentifikasi cenderung berupa perundungan verbal seperti ejekan atau panggilan bernada merendahkan, yang sering dibingkai sebagai candaan sehingga dampak psikologisnya kurang disadari. Pada sisi lain, penguatan karakter toleransi telah diupayakan melalui internalisasi nilai akhlak dan ajaran agama Islam, tetapi nilai tersebut belum sepenuhnya terintegrasi secara operasional dengan tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah lebih tampak sebagai perangkat administratif dan penegakan disiplin yang bersifat reaktif, sementara pendidikan karakter berjalan pada ranah normatif-moral. Keunikan MTsN 1 Tulungagung sebagai lokasi penelitian terletak pada kuatnya bingkai religius dalam pembentukan karakter toleransi, namun integrasinya dengan sistem aturan atau tata tertib sekolah masih bersifat doktrinal.[12]

Sementara itu, hasil observasi awal di SMPN 2 Ngunut, memperlihatkan pola relasi sosial yang relatif terbuka dengan interaksi antar peserta didik yang cair serta komunikasi guru yang dialogis. Kelompok dominan tidak tampak menonjol, tetapi kebebasan interaksi turut membuka ruang munculnya

[12] Hasil observasi di MTsN 1 Tulungagung tanggal 29 Januari 2026.

perundungan verbal yang diekspresikan melalui gurauan, ejekan, atau kata-kata kasar yang dinormalisasi sebagai humor. Bentuk perundungan lain tidak tampak menonjol bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda yang mengarah kesana, namun pola verbal ini menunjukkan gejala yang perlu dicermati. Penguatan karakter toleransi telah dilaksanakan melalui kerangka nilai Pancasila dan Kewarganegaraan, disertai pendidikan agama dan budi pekerti, tetapi pelaksanaannya masih berjalan paralel dengan tata tertib sekolah tanpa integrasi yang kuat. Tata tertib sekolah cenderung bersifat administratif, dengan penanganan pelanggaran yang lebih berorientasi pada sanksi formal meskipun juga terdapat upaya penguatan nilai preventif. Keunikan lokasi penelitian SMPN 2 Ngunut terletak pada pendekatan karakter toleransi berbasis norma sosial-kewarganegaraan yang relatif terbuka, namun integrasi nilai karakter toleransi dengan sistem disiplin melalui tata tertib masih bersifat teknis.[13]

Berdasarkan fenomena dan keunikan di kedua lokasi penelitian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara program penguatan karakter toleransi dengan implementasi tata tertib sekolah dalam mencegah perundungan. Kedua lokasi penelitian sama-sama telah memiliki fondasi nilai karakter toleransi yang kuat, yaitu nilai religius di MTsN 1 Tulungagung dan nilai kewarganegaraan di SMPN 2 Ngunut, serta perangkat aturan disiplin melalui tata tertib sekolah, namun integrasi keduanya masih belum terjalin secara optimal dalam membentuk perilaku sosial peserta didik. Kondisi ini menunjukkan realitas kompleks bahwa perundungan, khususnya verbal, masih berpotensi terjadi

[13] Hasil observasi di SMPN 2 Ngunut tanggal 26 Januari 2026.

dalam ruang interaksi sehari-hari meskipun secara normatif telah ada pendidikan karakter toleransi dan tata tertib sekolah.

Meskipun MTsN 1 Tulungagung dan SMPN 2 Ngunut yang menjadi lokasi penelitian sama-sama telah mengembangakn program penguatan karakter toleransi serta memiliki tata tertib sekolah yang dirancang untuk membentuk kedisiplinan peserta didik, kedua komponen tersebut pada praktiknya masih cenderung berjalan sendiri-sendiri. Di MTsN 1 Tulungagung, nilai toleransi lebih banyak ditanamkan melalui pendekatan religius dan pembiasaan sikap saling menghormati, sedangkan di SMPN 2 Ngunut penguatan toleransi ditanamkan dalam kerangka nilai kewarganegaraan dan kehidupan sosial yang majemuk. Namun, dalam kedua konteks tersebut, tata tertib sekolah belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen yang secara sadar dan sistematis memperkuat nilai toleransi dalam pola interaksi harian peserta didik. Akibat belum terbangunnya integrasi yang padu antara dimensi nilai internal dengan regulasi eksternal tersebut, masih terdapat ruang munculnya perilaku perundungan, terutama dalam bentuk verbal, di tengah interaksi keseharian peserta didik. Situasi ini memperlihatkan adanya jarak antara idealitas pendidikan karakter toleransi yang diajarkan dengan praktik pengelolaan perilaku melalui tata tertib sekolah. Kesenjangan konseptual dan operasional inilah yang menjadi celah ilmiah penelitian ini, sekaligus menegaskan urgensi akademik mengenai integrasi karakter toleransi dengan tata tertib sekolah sebagai upaya menciptakan lingkungan pendidikan bebas perundungan melalui sinergi nilai internal yaitu karakter toleransi dan regulasi eksternal yaitu tata

tertib sekolah dioptimalkan guna membangun budaya sekolah yang aman, inklusif, dan secara sistemik mencegah perundungan di lingkungan pendidikan jenjang menengah pertama.

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat kebutuhan akademik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan sistematis. Penelitian berjudul "Integrasi Karakter Toleransi dengan Tata Tertib Sekolah sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Pendidikan Bebas Perundungan (Studi Multi Kasus MTsN 1Tulungagung dan SMPN 2 Ngunut)" memiliki urgensi ilmiah untuk dilaksanakan, khususnya dalam rangka memperkaya literatur tentang integrasi antara penguatan karakter toleransi dengan regulasi kelembagaan dalam mencegah perundungan di lingkungan pendidikan. Mengingat masih tingginya angka kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan termasuk perundungan, serta belum menunjukkan penurunan kasus pada lima tahun terkahir secara signifikan terutama di sekolah jenjang menengah pertama MTs/SMP.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka penelitian ini berfokus pada integrasi karakter toleransi dengan tata tertib sekolah sebagai upaya menciptakan lingkungan pendidikan bebas perundungan di jenjang menengah pertama, dengan membandingkan MTsN 1 Tulungagung yang berlandaskan nilai agama Islam dan SMPN 2 Ngunut yang berlandaskan nilai moral kewarganegaraan. Penelitian ini memiliki tiga aspek fokus penelitian. *Pertama*, bentuk integrasi karakter toleransi dengan tata tertib sekolah dalam mencegah

perundungan di MTsN 1 Tulungagung dan SMPN 2 Ngunut. *Kedua*, peran aktor sekolah (kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan) dalam mengintegrasikan nilai toleransi ke dalam tata tertib sekolah. *Ketiga*, implikasi integrasi karakter toleransi dengan tata tertib sekolah terhadap pembentukan budaya sekolah bebas perundungan. berdasarkan fokus penelitian tersebut, selanjutnya peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk integrasi karakter toleransi dengan tata tertib sekolah dalam mencegah perundungan di MTsN 1 Tulungagung dan SMPN 2 Ngunut?
2. Bagaimana peran aktor sekolah dalam mengintegrasikan nilai toleransi ke dalam tata tertib sekolah?
3. Bagaimana implikasi integrasi karakter toleransi dengan tata tertib sekolah terhadap pembentukan budaya sekolah bebas perundungan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini mempunyai fungsi dan tujuan yang sesuai dengan fokus penelitian tersebut. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk integrasi karakter toleransi dengan tata tertib sekolah dalam mencegah perundungan di MTsN 1 Tulungagung dan SMPN 2 Ngunut.
2. Untuk mengkaji peran aktor sekolah dalam mengintegrasikan nilai toleransi ke dalam tata tertib sekolah.

3. Untuk menganalisis implikasi integrasi karakter toleransi dengan tata tertib sekolah terhadap pembentukan budaya sekolah bebas perundungan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini menguatkan dan mengembangkan teori *Character Education* yang digagas oleh Thomas Lickona karena peneliti meneliti karakter toleransi yang terkait *moral knowling, feeling, action*.[14] Penelitian ini juga memperkuat dan mengembangkan teori *Bullying & School Climate* yang digagas oleh Dan Olweus karena penelitian ini berfokus pada menciptakan lingkungan pendidikan bebas perundungan melalui penguatan karakter dan penerapan aturan.[15] Penelitian ini juga sekaligus menolak anggapan bahwa tata tertib saja cukup untuk mencegah perundungan, serta anggapan bahwa pendidikan karakter hanya berupa pembiasaan. Artinya, untuk menciptakan lingkungan pendidikan bebas perundungan, aturan saja tidak cukup tanpa pembinaan karakter, begitupun sebaliknya. Namun, keduanya harus diintegrasikan untuk saling melengkapi dan menguatkan sebagai upaya menciptakan lingkungan pendidikan bebas perundungan.

---

[14] Baiq Roni Indira Astriya, "Implementasi Pendidikan Karakter (Character Education) Melalui Konsep Teori Thomaslickona Di Paud Sekarwangi Wanasaba," *JEA: Jurnal Edukasi Aud* 8, No. 2 (2022), hlm 229-230.

[15] Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, Farida Kurniawati, dan Dominikus David Biondi Situmorang, "Bullying Di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian Dan Cara Menanggulanginya," *PEDAGOGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan* 17, no. 1 (23 April 2019), hlm 57-58. doi:10.17509/pdgia.v17i1.13980.

2. Secara Praktis

a. Bagi Kepala Sekolah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan serta program sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan bebas perundungan.

b. Bagi Pendidik atau Guru

Hasil penelitian ini memberikan referensi tentang metode pembinaan peserta didik yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai positif, baik melalui integrasi pendidikan agama maupun pendidikan moral umum di kelas maupun di luar kelas yang mendukung upaya menciptakan lingkungan pendidikan bebas perundungan.

c. Bagi Konselor atau Guru BK

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dan bahan informasi dalam merancang program konseling preventif dan intervensi yang relevan dengan karakteristik sekolah masing-masing sebagai upaya menciptakan lingkungan pendidikan bebas perundungan.

d. Bagi Peserta Didik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran tentang dampak negatif tindakan perundungan serta memotivasi mereka untuk membangun relasi yang harmonis di lingkungan pendidikan atau sekolah serta di lingkungan masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Dalam rangka untuk menjelaskan pemahaman tentang integrasi karakter toleransi dengan tata tertib sekolah sebagai upaya menciptakan lingkungan pendidikan bebas perundungan, maka istilah-istilah dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual
   a. Integrasi

      Integrasi dapat dipahami sebagai suatu kesatuan yang utuh dan tidak terpecah, di mana berbagai unsur yang berbeda saling berhubungan secara harmonis dalam satu kesatuan yang menyeluruh. Integrasi mencakup keterpaduan berbagai disiplin ilmu yang saling melengkapi dan berinteraksi untuk membentuk jalinan pengetahuan yang utuh. Upaya integrasi tidak dimaksudkan untuk meleburkan perbedaan antar unsur, melainkan untuk mendekatkan, mengaitkan, dan menghubungkan berbagai elemen tersebut agar tercipta keselarasan dan kesatuan yang bermakna dalam satu sistem yang terpadu.[16]

   b. Integrasi Sosial

      Integrasi sosial menekankan keterpaduan antara nilai inti, peran sosial, dan norma sebagai prasyarat keterpaduan sistem sosial. Integrasi sosial terjadi ketika unsur-unsur dalam sistem tersebut tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling menopang sehingga tercipta keteraturan

[16] Novianti Muspiroh, "Integrasi Nilai Islam Dalam Pembelajaran IPA (Perspektif Pendidikan Islam)," *Jurnal Pendidikan Islam* 28, no. 3 (23 Februari 2016), hlm 487.

sosial.[17] Integrasi sosial sangat relevan dengan konteks kelembagaan, termasuk pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan bagian dari sistem sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan keluarga dan masyarakat. Lembaga pendidikan menjalankan fungsi sosialisasi nilai inti, pembentukan peran sosial, serta penanaman norma peserta didik agar mampu berpartisipasi secara tertib dalam kehidupan sosial.[18]

c. Karakter Toleransi

Karakter terbagi menjadi dua kategori. *Pertama*, karakter yang bersifat fitrah, yang kekuatannya telah menyatu dalam diri manusia sejak lahir dan terus berlanjut sepanjang hidup. *Kedua*, karakter yang terbentuk melalui pengalaman, pengamalan, dan kebiasaan yang ditaati sehingga menjadi bagian dari kepribadian seseorang.[19] Sedangkan toleransi adalah sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan penghargaan terhadap perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti agama, suku, etnis, budaya, pandangan, maupun tindakan orang lain. Sikap ini mencerminkan kemampuan individu untuk menerima keberagaman sebagai bagian alami dari kehidupan sosial tanpa memandang rendah atau menolak keberadaan pihak lain yang berbeda.[20]

---

[17] George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm 25.

[18] Maslahatun Nikmah, "School Analysis Is System Social Perspective By Talcott Parsons", *Majemuk: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1, (Februari 2025), hlm 30-32.

[19] M. Ulul Azmi dkk., "Parasit Ilmu Dalam Pendidikan Islam Perspektif Ihya Ulumuddin," *AL-QALAM: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan* 16, no. 2 (30 Desember 2024), hlm 449.

[20] Aswidar dan Saragih, "Karakter Religius, Toleransi, dan Disiplin pada Siswa Sekolah Menengah Pertama,"…, hlm 139.

Penguatan karakter toleransi merupakan proses terencana dan sistematis yang dilakukan sekolah untuk membentuk kepribadian peserta didik berlandaskan nilai-nilai akhlak, moral, etika, dan spiritual. Proses ini dilaksanakan melalui pembelajaran, pembiasaan, keteladanan dan penciptaan lingkungan sekolah yang kondusif. Tujuannya adalah membantu peserta didik memahami serta menghayati nilai-nilai luhur, mengembangakan kompetensi intelektual, membangun penampilan yang positif, dan menumbuhkan kemauan untuk memperjuangkan kebaikan.[21]

d. Tata Tertib Sekolah

Tata tertib sekolah merupakan seperangkat aturan, prosedur, dan program yang dirancang untuk mengatur serta mengarahkan perilaku warga sekolah dengan tujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, tertib, dan bebas dari perundungan. Tata tertib tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam aktivitas sehari-hari, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mencegah dan menangani tindakan perundungan di lingkungan pendidikan. Tata tertib sekolah bertujuan memastikan setiap peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan mampu melaksanakan hak, kewajiban, serta tanggung jawab secara

[21] Febrianti Febrianti, Soelfema Soelfema, dan Lili Dasa Putri, "Penguatan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam di Era Digital," *Bhinneka: Jurnal Bintang Pendidikan dan Bahasa* 3, no. 1 (23 Desember 2024), hlm 366. doi:10.59024/bhinneka.v3i1.1207.

seimbang sehingga proses pembelajaran dapat tertib, aman, dan kondusif.[22]

e. Lingkungan Pendidikan Bebas Perundungan

Lingkungan bebas perundungan merupakan kondisi ideal dimana sekolah mampu menghadirkan suasana aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh warga sekolah. Dalam lingkungan seperti ini, tidak terdapat praktik intimidasi, kekerasan, atau pelecehan baik dalam bentuk fisik, verbal, relasional, maupun *cyber*.[23] Sekolah memegang peranan penting dalam menciptakan suasana lingkungan bebas perundungan dengan menyusun tata tertib yang tegas, mekanisme pengaduan efektif, serta menyediakan dukungan bagi peserta didik uang menjadi korban. Pendidik dan tenaga kependidikan juga dituntut memiliki kemampuan dalam mengenali tanda-tanda perundungan sehingga dapat segera mengambil tindakan yang tepat.[24]

f. Perundungan (*Bullying*).

Perundungan merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh individu atau kelompok terhadap pihak yang lebih lemah secara fisik, psikologis, maupun sosial. Perilaku ini bertujuan menyakiti korban dan seringkali menimbulkan tekanan, rasa

---

[22] Widyaningtyas dan Mustofa, "Implementasi Kebijakan Anti-Bullying Sekolah Adipangastuti Di SMAN 1 Surakarta."..., hlm 857.

[23] Disah Alya Nabila, Wawan Hermawan, dan Agus Fakhruddin, "Strategi Sekolah dalam Mengantisipasi Perundungan Melalui Program Keagamaan," *Didaktika: Jurnal Kependidikan* 14, no. 1 (15 Februari 2025), hlm 392. https://jurnaldidaktika.org.

[24] Elissa Virginia, Gunardi Lie, dan Moody Rizqy Syailendra Putra, "Pencegahan Bullying Untuk Membangun Lingkungan Yang Aman," *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3, no. 1 (2024), hlm 439.

takut, isolasi sosial, bahkan trauma. Perilaku perundungan dapat dikategorikan menjadi perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan relasional, dan perundungan *cyber*.[25]

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional ditetapkan pada fokus kajian mengenai integrasi karakter toleransi dengan tata tertib sekolah sebagai strategi menciptakan lingkungan pendidikan bebas perundungan di MTsN 1 Tulungagung dan SMPN 2 Ngunut tanpa memperluas kajian pada lembaga pendidikan lain di luar cakupan tersebut. Objek penelitian dalam penelitian ini mencakup program pendidikan karakter toleransi melalui internalisasi nilai akhlak dalam ajaran agama Islam di MTsN 1 Tulungagung, dan nilai Pancasila dan Kewarganegaraan di SMPN 2 Ngunut, serta penerapan tata tertib di kedua lokasi penelitian. Adapun subjek penelitian mencakup Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru Akhlak dan PPKn, Guru BK, serta peserta didik yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung terkait menciptakan lingkungan pendidikan bebas perundungan.

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti memandang penting untuk menyajikan sistematika pembahasan guna memudahkan pemahaman terhadap isi tesis ini. Maka peneliti mengemukakan sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

[25] Darmayanti, Kurniawati, dan Situmorang, "Bullying Di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian Dan Cara Menanggulanginya."…, hlm 59-60.

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini, pertama-tama peneliti memaparkan konteks penelitian, kemudian dilakukan fokus penelitian/pertanyaan penelitian yang akan dikaji dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang membantu dalam proses penelitian. Bab ini, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian dirumuskan secara jelas, setelah itu dilanjutkan dengan penegasan istilah, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka. Kajian pustaka dalam bab ini membahas mengenai, a) Deskripsi teori yaitu, Integrasi, Karakter Toleransi, Tata Tertib Sekolah, Perundungan, Lingkungan Pendidikan Bebas Perundungan, Hubungan Antara Karakter Toleransi, Tata Tertib Sekolah, dan Lingkungan Pendidikan Bebas Perundungan. b) Hasil penelitian terdahulu yang mencakup 15 penelitian yang relevan dengan penelitian ini dalam 10 tahun terakhir. c) Paradigma (kerangka konseptual).

Bab III Metode Penelitian. Bab ini membahas tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian. Bab ini akan disajikan mengenai paparan data, temuan data, dan pembahasan dari penelitian mengenai integrasi karakter toleransi dengan tata tertib sekolah sebagai upaya menciptakan lingkungan pendidikan bebas perundungan yang meliputi bentuk integrasi karakter toleransi dengan tata tertib sekolah dalam praktik pendidikan sehari-hari, peran kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengintegrasikan

nilai toleransi ke dalam penegakan tata tertib sekolah, dan integrasi karakter toleransi dengan tata tertib sekolah membentuk budaya sekolah yang menolak perundungan.

Bab V Pembahasan. Bab ini menyajikan tentang pembahasan dari rumusan masalah.

Bab VI Penutup. Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian

Bagian akhir terdiri dari: Daftar rujukan dan lampiran-lampiran.